

STRATEGI INSPEKTORAT DALAM MEMBANTU MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR
TANPA PENGECEUALIAN (WTP) ATAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Eriza Venaya
NPP. 30.0879

Asdaf Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat
Program Keuangan Publik
Email: erizavenaya@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Idris, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author sees that Sambas Regency has received an Unqualified Opinion (WTP) three years in a row which is a source of pride for the Sambas Regency Regional Government. **Purpose:** The purpose of this study is how the Regional Inspectorate of Sambas Regency seeks to assist the Sambas Regency Regional Government in order to maintain the WTP Opinion that has been obtained from 2018. **Method:** using descriptive qualitative research methods by referring to Rangkuti Theory and conducting the Litmus Test. The collection technique used the process of interviews, observation, and documentation as well as filling out questionnaires to three respondents. **Result:** The Inspectorate's Strategy in Helping Maintain the Unqualified Opinion (WTP) on the Financial Statements of Sambas Regency, West Kalimantan Province, which has been compiled using SWOT analysis and then tested using the Litmus Test, found that of the seven issues that have been compiled using the SWOT Matrix and then carried out the litmus test of the seven issues compiled, two of them have a less strategic category, and the other five issues are quite strategic. Of the seven strategic issues compiled, there are no issues that fall into the very strategic category. **Conclusion:** None of the seven strategic issues compiled fell into the very strategic category. From these results, it can be assumed that the issues prepared have not met the criteria to be used by the Regional Inspectorate of Sambas Regency in an effort to help maintain the Unqualified Opinion (WTP).

Keywords: WTP Opinion, SWOT, Litmus Test, Inspectorate

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis melihat kebelakang Kabupaten Sambas telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tiga tahun berturut yang menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas berupaya dalam membantu Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas agar dapat mempertahankan Opini WTP yang sudah didapatkan dari tahun 2018. **Metode:** menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan mengacu pada Teori Rangkuti dan dilakukannya Uji Test Litmus. Teknik pengumpulan digunakanlah proses wawancara, observasi, dan dokumentasi serta pengisian angket terhadap tiga responden. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Strategi Inspektorat Dalam Membantu Mempertahankan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang telah disusun menggunakan analisis SWOT dan kemudian diuji menggunakan Uji Test Litmus menemukan bahwa dari ketujuh isu yang telah disusun menggunakan Matriks SWOT kemudian dilakukan uji test litmus dari tujuh isu yang disusun, dua diantaranya memiliki kategori kurang strategis, dan lima isu lainnya cukup strategis. Dari tujuh isu strategis yang disusun tidak ada isu yang masuk kedalam kategori sangat strategis. **Kesimpulan:** Dari tujuh isu strategis yang disusun tidak ada isu yang masuk kedalam kategori sangat strategis. Dari hasil tersebut maka dapat diasumsikan bahwa isu-isu yang disusun belum cukup memenuhi kriteria untuk digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas dalam upaya membantu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kata kunci: Opini WTP, SWOT, Uji Test Litmus, Inspektorat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 membahas suatu LKPD dikatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan WTP yakni apabila dalam pemeriksaan oleh BPK, laporan keuangan entitas yang diperiksa dapat menyajikan kewajaran tanpa pengecualian pada setiap material, posisi keuangan Pemerintah/Kementerian/Lembaga/ Badan tertentu per tanggal 31 Desember (akhir masa tahun anggaran), realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan SAP. Inspektorat Jenderal memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 Pasal 1435 dan 1436, yakni Inspektorat Jenderal memiliki tugas dalam pengawasan di lingkup internal lingkungan Kementerian Keuangan. Serta tugas dari Inspektorat Jendral itu sendiri yakni: dalam menyiapkan perumusan kebijakan terhadap pengawasan intern pada lingkungan Kementerian Keuangan; dilaksanakan kegiatan dalam hal mengawasi intern dalam lingkup Kementerian Keuangan akan kinerja dan keuangan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; tujuan tertentu yang dilaksanakan yang dicapai dari pengawasan atas penugasan Menteri Keuangan; menyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan; serta pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Dadang, dkk (2017:3) dalam bukunya menyebutkan sebelum laporan keuangan disajikan kepada BPK oleh kepala daerah, laporan keuangan lebih dahulu dilakukan reviu oleh inspektorat untuk memberi keyakinan atas laporan keuangan agar laporan keuangan yang akan diberikan kepada kepala daerah telah benar-benar sesuai dengan SAP, hasil reviu tersebut yang dijadikan dasar pembuatan pertanggungjawaban oleh kepala daerah dan kemudian dilakukan audit oleh BPK dalam rangka pemberian opini.

Inspektorat yang memiliki peran me-reviu laporan keuangan memiliki pengaruh dalam proses pemberian opini yang diterbitkan oleh BPK, dimana hasil reviu yang dikeluarkan berupa Laporan Hasil Reviu (LHR) dengan surat berisikan “Pernyataan Telah Direviu” yang kemudian dipertimbangkan untuk membuat LKPD final yang akan diberikan kepada BPK (Suwanda dkk, 2017 : 3-4). Sebelum disampaikan kepada BPK, apabila dalam proses reviu didapati bahwa LKPD memiliki kelemahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pe-riviu dapat merekomendasikan kepada entitas agar sesegera mungkin melakukan penyesuaian atau perbaikan atas kelemahan yang ditemukan dengan tetap bertahap dan berjenjang. Inspektorat Kabupaten Sambas dalam pelaksanaannya, dipercayakan untuk dapat membantu me-reviu laporan keuangan Kabupaten Sambas sebelum diserahkan kepada kepala daerah yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada BPK. Inspektorat juga dapat melakukan pembinaan terhadap Organisasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keuangan daerah, sehingga pada proses audit oleh BPK laporan keuangan sudah maksimal dan BPK dapat memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan. Kabupaten Sambas

sendiri telah mendapatkan pernyataan opini WTP selama kedepannya diharapkan akan terus mendapatkan pernyataan yang sama

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan selanjutnya dilakukan oleh BPK yang menghasilkan laporan hasil pemeriksaan dengan didalamnya memuat opini sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. Dalam hal pemberian opini tentang kewajaran informasi pada LKPD, opini yang diberikan BPK terdiri dari 4 jenis seperti yang disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1) yakni: “opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion), dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion)”. Dengan adanya SAP, pemerintah daerah baik itu Pemerintah Daerah Provinsi hingga ke Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota diharuskan dapat menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang bersifat transparan dan sesuai dengan SAP demi mencapai opini atas laporan keuangan oleh BPK. Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan tingkatan teratas diantara opini-opini yang diberikan oleh BPK, dimana untuk meraih opini tanpa pengecualian memiliki beberapa persyaratan yang dijelaskan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16 ayat (1).

Inspektorat Kabupaten Sambas dalam pelaksanaannya, dipercayakan untuk dapat membantu mereviu laporan keuangan Kabupaten Sambas sebelum diserahkan kepada kepala daerah yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada BPK. Inspektorat juga dapat melakukan pembinaan terhadap Organisasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan keuangan daerah, sehingga pada proses audit oleh BPK laporan keuangan sudah maksimal dan BPK dapat memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa kabupaten sambas pada tahun 2016 dan 2017 mendapatkan opini WDP yang kemudian di tahun 2018 Kabupaten Sambas mengalami kemajuan dengan mendapatkan opini WTP, tahun 2018 hingga tahun 2020 kabupaten sambas konsisten mempertahankan opini WTP yang telah diraih. Akan pernyataan tersebut muncullah pertanyaan akan bagaimana strategi Inspektorat dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan sehingga di tahun-tahun kedepan Kabupaten Sambas dapat mempertahankan Opini WTP.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu,. Penelitian Hanifah Afdisyia berjudul Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat (Hanifah Afdisyia, 2021), Pemda Kota Solok memiliki beberapa hambatan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kemudian pemerintah Kota Solok melakukan beberapa upaya yakni meningkatkan kompetensi dari SDM, meningkatkan sarana & prasarana yang ada, mengimplementasikan pengembangan SIKD, mengoreksi kesalahan saji laporan keuangan. Dalam peningkatan kualitas dari laporan keuangan Pemda Kota Solok digunakanlah analisis SWOT. Penelitian La Ode Hasiara, Sudarlan, Ahyar Muhammad Diah menemukan bahwa Dalam peraihan opini WTP untuk provinsi Kalimantan Timur semua OPD memiliki tanggung jawab yang sama dalam peraihan opini WTP (La Ode Hasiara, Sudarlan, Ahyar Muhammad Diah, 2019). Penelitian Eko Susilo Haryadi, Kamaliah, Vince Ratnawati menemukan bahwa Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Singingi telah melakukan pengungkapan yang menyajikan laporan keuangan yang telah berpedoman kepada SAP. Kemudian kedua kabupaten tersebut telah melakukan pengungkapan wajib juga dengan

pengungkapan sukarela, yang cenderung tingkat pengungkapan baik. (Eko Susilo Haryadi, Kamaliah, Vince Ratnawati, 2015). Penelitian berikutnya adalah penelitian Kusuma Isbi Rahmadani membahas Kota Salatiga menargetkan opini WTP sebagai penilaian tertinggi. Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah kota salatiga dalam mempertahankan opini WTP: Pertama komitmen pimpinan beserta bawahan sebagai komponen utama. Kedua, peningkatan pengelolaan barang milik daerah dan piutang. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keempat, Pembentukan tim penyusun laporan keuangan. Kelima, meningkatkan teknologi informasi. Keenam, meningkatkan peran inspektorat sebagai auditor internal. Selama pelaksanaan ada kendala yang sering ditemui dalam mempertahankan opini WTP yaitu mutasi jabatan dan aplikasi SIAP yang belum optimal. (Kusuma Isbi Rahmadani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian Miftahur Rohmah, penulis menemukan terdapat beberapa permasalahan yakni beberapa kelemahan diantaranya kelemahan akuntabilitas pengelolaan keuangan, akuntabilitas pengelolaan aset, sumber daya manusia, regulasi, kelembagaan, sistem. Adapun solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat akuntabilitas baik pengelolaan keuangan maupun aset, meingkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, regulasi, kelembagaan dan sistem. (Miftahur Rohmah, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni strategi dari inspektorat dalam upaya membantu Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas mendapatkan opini WTP yang diolah menggunakan analisis swot, pada umumnya penelitian yang mengangkat pembahasan akan Opini WTP ber-lokus di BPKAD akan tetapi pada penelitian ini, peneliti memiliki lokus di Inspektorat Daerah Kabupaten. Penelitian ini berisikan strategi yang diolah peneliti menggunakan matriks swot dan kemudian dilakukan uji test litmus.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui strategi Inspektorat dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan.

II. METODE

Peneliti dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada proses pengumpulan data digunakanlah proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Skripsi ini menggunakan alat analisis yakni Analisa SWOT yang dikemukakan oleh Rangkuti dengan menganalisa strategi menggunakan empat faktor yakni, kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), serta yang terakhir ancaman (Threats).

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas sebagai informan yang kemudian dalam proses pengisian angket, ada tiga sumber yang menjadi informan terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan Analis Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi yang dapat digunaka oleh inspektorat daerah kabupaten sambas menggunakan matriks swot berdasarkan faktor internal yang ispektorat miliki dan juga faktor eksternal yang hadir, setelah didapatkan strategi yang menjadi isu-isu strategis kemudian peneliti melakukan uji tes litmus kepada isu-isu yang sudah terbentuk menggunakan matriks swot sehingga

didapatkanlah hasil yang kemudian didapatkan sebagai hasil final. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Strategi Inspektorat Dalam Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan

Bentuk dari upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas oleh Inspektorat selanjutnya menggunakan alat analisis SWOT. Analisis SWOT yang dikemukakan Rangkuti memiliki empat fokus analisis yakni kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Berikut adalah penjelasan atas empat fokus analisis

Kekuatan:

1. Dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 yang mengatur tentang pembentukannya susunan perangkat daerah serta didalamnya terdapat tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dipegang secara masing masing
2. Adanya Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 53 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
3. Adanya hubungan kerjasama antara Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas dengan OPD lain yang ada di Kabupaten Sambas.
4. Adanya komitmen Inspektorat untuk me-reviu LKPD sebelum dilaporkan kepada BPK

Kelemahan:

1. Tidak updatenya situs resmi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas dalam pembaharuan informasi, berita, serta dokumentasi kegiatan.
2. Keterbatasan SDM yang menjadi tim pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Sambas apabila dibandingkan dengan seluruh OPD di Kabupaten Sambas yang hendak diperiksa.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang belum optimal

Peluang:

1. Setiap OPD yang berada di Kab Sambas memiliki komitmen dimana agar dapat menyerahkan laporan keuangan setiap OPD untuk dilakukan pemeriksaan rutin.
2. Memiliki Instansi/lembaga/ organisasi melaksanakan diklat serta pelatihan yang digunakan untuk mengembangkan skill aparat yang kompeten
3. Kab Sambas mendapatkan Dana Insentif Daerah yang didapat dari hasil peraihan Opini WTP tiga tahun berturut-turut

Ancaman:

1. OPD Terlambat menyerahkan dokumen-dokumen yang hendak diperiksa
2. Ketidak sesuaian OPD dalam pengalokasian DPA

Peneliti melakukan proses identifikasi setelah sebelumnya melakukan analisis umum, identifikasi yang dilakukan peneliti menggunakan matriks SWOT yang digunakan agar mendapatkan strategi-strategi yang diperuntukan agar Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas dapat membantu Kabupaten Sambas mempertahankan Opini WTP. Dengan dibentuknya matriks SWOT maka dapat diketahui akan faktor-faktor apa saja yang sesuai dan dapat disusun menjadi strategi yang dapat digunakan sebagai bentuk strategi Inspektorat dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah didapatkan Kabupaten Sambas tiga tahun berturut-turut kebelakang sesuai dengan posisi kuadran masing-masing. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut terkait matriks SWOT sesuai dengan kuadran-kuadran:

1. Strategi S-O

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 agar perangkat daerah berada di posisi yang sesuai serta pelaksanaan akuntansi daerah lebih maksimal; Mempertahankan hubungan antara Inspektorat dengan OPD di

Kabupaten Sambas agar penyerahan Laporan Keuangan untuk di reviu sebelum diperiksa oleh BPK dapat diserahkan tepat waktu.

2. Strategi S-T

Mempererat koordinasi antara OPD dan Inspektorat agar pemeriksaan terhadap OPD dapat berlangsung lancar serta tidak terjadi keterlambatan penyerahan dokumen; Memperjelas Peraturan Bupati Kabupaten Sambas No.53 Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No.4 Tahun 2016 agar tidak adanya kesalahan pengalokasian pendapatan dan belanja yang berada pada DPA.

3. Strategi W-O

Mengembangkan aplikasi serta situs resmi Inspektorat menggunakan Dana Insentif Daerah yang telah didapatkan; Mendalami Sistem Pengendalian Intern melalui Instansi/ lembaga/ organisasi pelaksanaan diklat serta pelatihan sebagai bentuk memaksimalkan SDM yang ada.

4. Strategi W-T

Relokasi Pegawai yang memiliki kompetensi ke Inspektorat.

Setelah dilakukannya pengelompokan akan faktor internal dan faktor eksternal menggunakan matriks swot dan menghasilkan isu-isu strategi, kemudian isu-isu yang telah dihasilkan dilakukanlah pengujian menggunakan uji test litmus untuk menghitung tingkat kestrategisan masing-masing isu yang dihasilkan dan untuk mengetahui isu mana yang paling memungkinkan untuk digunakan inspektorat dalam upaya membantu mempertahankan opini wtp di Kabupaten Sambas. Uji test litmus menguji isu yang telah disusun menggunakan 13 pertanyaan pada uji test litmus dan kemudian diberikanlah skor 1-3 sebagai bentuk menjawab pertanyaan tersebut, dimana untuk skor 1 dianggap bersifat operasional hingga skor 3 dianggap sangat strategis. Total skor yang didapatkan dari 13 pertanyaan Uji Test Litmus yang diajukan kepada para informan kemudian dijumlahkan dan diambil nilai rata rata dari setiap isu-isu strategis. Kemudian dari Uji Test Litmus yang dihasilkan akan membentuk interval sebagai berikut:

- Jika total skor antara 13-21 maka Isu kurang Strategis
- Jika total skor antara 22-30 maka Isu cukup Strategis
- Jika total skor antara 31-39 maka Isu sangat Strategis

Setelah dilakukan pengujian terhadap isu-isu strategis untuk menemukan strategi yang pas bagi Inspektorat Kabupaten Sambas untuk membantu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, menggunakan Uji Test Litmus dengan berisikan 13 pertanyaan yang selanjutnya ditanggapi oleh tiga orang responden dari Inspektorat Kabupaten Sambas. Isu-isu yang memiliki skor tertinggi merupakan isu strategis yang kemudian paling cocok untuk diterapkan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas sendiri. Berikut merupakan hasil dari Uji Test Litmus yang telah dilakukan pada tiga orang responden dari Inspektorat Kabupaten Sambas berdasarkan Isu-isu Strategis: berikut adalah hasil analisis dari test litmus yang dilakukan:

Isu-Isu Strategis	Skor Rata-Rata	Kategori
Isu 1	27	Cukup Strategis
Isu 2	24	Cukup Strategis
Isu 3	19	Kurang Strategis
Isu 4	18	Kurang Strategis
Isu 5	28	Cukup Strategis
Isu 6	23	Cukup Strategis
Isu 7	25	Cukup Strategis

Isu-isu yang telah disusun oleh penulis rata-rata belum memenuhi karakteristik isu yang sangat strategis, oleh karena itu dapat dimunculkan beberapa asumsi sebagai penyebab isu tersebut belum menjadi Isu yang sangat strategis sesuai dengan analisis hasil dari Uji Test Litmus yang telah dilakukan sebelumnya. Sesuai dengan uji test litmus yang dilakukan, yang dapat dijadikan alasan mengapa isu-isu tersebut belum bisa mencapai kriteria Sangat Strategis yakni salah satunya berkaitan dengan Kapan isu tersebut akan menjadi peluang dalam keikutsertaan yang mana dalam hal ini yang dimaksudkan adalah membantu mempertahankan Opini WTP Kabupaten Sambas. Pada persoalan ini semua isu-isu strategis yang disampaikan menunjukkan bahwasanya setiap isu belum memiliki urgensi dalam beberapa tahun kedepan yang dibuktikan dengan setiap pertanyaan mengenai Kapan isu tersebut akan menjadi peluang dalam keikutsertaan membantu mempertahankan Opini WTP Kabupaten Sambas pada setiap isu strategis yang disampaikan, informan menjawab isu tersebut menjadi peluang dalam keikutsertaan pada masa “saat ini”, yang mana isu strategi ini diharapkan dan ditujukan dapat membantu keberlangsungan OPD dalam waktu kedepan tidak hanya pada masa kini saja.

Kemudian salah satu faktor lain yang dapat diasumsikan sebagai alasan mengapa isu-isu yang disampaikan belum dapat memasuki kriteria sangat strategis adalah persoalan apakah strategi bagi pemecahan isu tersebut memerlukan persyaratan, yang mana dalam prasyarat berisikan akan Pengembangan tujuan dan program pengembangan baru; Perubahan yang nyata dalam hal sumber pajak/pembiayaan; Perubahan yang nyata dalam hal perubahan perundangundangan; Perubahan (modifikasi) fasilitas utama; Penambahan staf yang nyata. Pada syarat tersebut berisikan hal-hal yang menjadi bahan agar suatu isu dapat sesuai serta ideal untuk digunakan dalam masa yang akan datang. Akan tetapi dalam pelaksanaan uji test litmus terhadap isu-isu strategis yang disampaikan oleh peneliti, responden/ informan sebagian besar menjawab syarat tersebut “Tidak” diperlukan pada isu-isu yang diajukan yang menandakan bahwa isu tersebut idealnya belum dapat digunakan dalam masa yang akan datang sebagai strategi yang diperuntukan untuk membantu OPD tersebut.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangannya untuk selanjutnya diperiksa sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah akan penggunaan anggaran dalam masa tahun anggaran. Hasil dari pemeriksaan laporan keuangan tersebut BPK akan mengeluarkan opini sebagai *feedback* dari hasil laporan keuangan. Bagi daerah yang mendapatkan Opini WTP — opini tertinggi yang diberikan BPK, akan menjadi suatu kebanggaan bagi daerah tersebut dan menjadikan hal tersebut sebagai target pelaksanaan pemerintahan daerah. Strategi Inspektorat dalam upaya membantu mempertahankan opini WTP di Kabupaten Sambas yang diolah oleh peneliti disusun dari faktor internal yang peneliti temukan di dalam inspektorat sendiri dan dari faktor eksternal kemudian hadir di inspektorat sebagai bentuk peneliti memberikan solusi untuk inspektorat agar lebih mudah dalam pelaksanaan mempertahankan Opini WTP. Faktor-faktor internal dan inspektorat yang didapati oleh peneliti kemudian diolah menggunakan matriks swot yang kemudian menghasilkan tujuh isu-isu strategis.

Tujuh isu strategis yang diolah peneliti menggunakan matriks swot kemudian dilakukan pengujian menggunakan uji test litmus untuk mengetahui strategi mana yang paling ideal untuk direalisasikan di inspektorat. Setelah dilakukan pengujian menggunakan uji tes litmus, maka ditemukan bahwa dari tujuh isu yang terbentuk belum cukup ideal untuk digunakan inspektorat di masa akan datang sebagai upaya membantu mempertahankan opini WTP yang diterima Kabupaten Sambas.

Apabila melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Hanifah Afdisyah, strategi yang diangkat merupakan strategi yang dimiliki oleh BPKAD Kota Solok sebagai strategi mempertahankan Opini

WTP Kota Solok terhadap LKPD (Hanifah Afdisyah, 2021) berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah, dimana dalam penelitian ini peneliti mengangkat strategi yang telah diolah menggunakan matriks swot melalui observasi peneliti sedangkan yang dalam penelitian Hanifah, sang peneliti mengangkat strategi yang sudah digunakan oleh OPD dan menganalisa apakah pelaksanaan strategi tersebut apakah sudah sesuai.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa strategi yang diolah belum dapat digunakan oleh inspektorat sebagai upaya dalam membantu mempertahankan opini wtp apabila melihat dari hasil uji test litmus yakni belum *urgent* isu tersebut dalam waktu dekat sehingga menjadi pertimbangan untuk menggunakan isu tersebut sebagai strategi di masa yang akan datang.

IV. KESIMPULAN

Strategi Inspektorat Dalam Membantu Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat yang telah disusun menggunakan analisis SWOT dan kemudian diuji menggunakan Uji Test Litmus menemukan bahwa dari ketujuh isu yang telah disusun menggunakan Matriks SWOT kemudian dilakukan uji test litmus dari tujuh isu yang disusun, dua diantaranya memiliki kategori kurang strategis, dan lima isu lainnya cukup strategis. Dari tujuh isu strategis yang disusun tidak ada isu yang masuk kedalam kategori sangat strategis. Dari hasil tersebut maka dapat diasumsikan bahwa isu-isu yang disusun belum cukup memenuhi kriteria untuk digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas dalam upaya membantu mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dalam pelaksanaan penelitian .

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar strategi-strategi yang dianggap belum ideal untuk digunakan dapat dikaji kembali di kemudian hari sebagai bahan pertimbangan strategi untuk inspektorat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada segenap aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Sambas yang telah bersedia menjadi informan dan ikut serta membantu pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Rangkuti, Freddy. (2014). SWOT Balanced Scorecard. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suwanda, Dadang, Wiratmoko and Lindri, Irene. (2017). Panduan Penerapan Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- Hasiara, La Ode, Sudarlana dan Diah, Ahyar Muhammad. 2019. “Komitmen Pemerintah Meraih Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Provinsi Kalimantan Timur-Indonesia”. Jurnal Akuntansi Multi Dimensi Vol 2. Samarinda
- Haryadi, Eko Susilo, Kamilah dan Ratnawati, Vince. 2015.” Analisis Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Kabupaten Yang Meraih Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dua

Tahun Berturut-Turut” Jurnal Akuntansi Vol 3. Riau.

Afdisyah, Hanifah. 2021. Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok Provinsi Sumatera Barat. Skripsi. Sumedang: IPDN.

Rahmadani, Kusuma Isbi . 2017. Strategi Mempertahankan Opini Wtp Atas Laporan Keuangan Berbasis Akrua (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Salatiga). Universitas Brawijaya

Rohmah, Miftahur. 2023. Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Wtp) Atas Laporan Keuangan Berbasis Akrua Pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri. UIN Satu Tulungagung

